

JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698
Volume 09, Nomor 02, Oktober 2019
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan
Pengembangan Kemenristekdikti No. 23/E/KPT/2019



Pusat Kajian Bali dan Pusat Unggulan Pariwisata
Universitas Udayana

Konstruksi Identitas Kolektif Warga Desa Adat dalam Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali

I Made Anom Wiranata¹ dan Hotman Siahaan²

^{1,2}Universitas Airlangga

Email: i.made.anom.wiranata-2015@fisip.unair.ac.id

Abstract

The Collective Identity Construction of Customary Village Members in the Movement of Rejecting Benoa Bay Reclamation in Bali

The collective identity as customary village members in Bali has played a significant role in creating consistency of the movement to reject the Benoa Bay reclamation project. This article aimed to study the construction of the collective identity of the customary village members in Bali. By using a qualitative research method with a phenomenological approach, this study examines the structure of awareness of the subjects concerning the phenomenon of the movement rejecting the Benoa Bay reclamation plan. This research finds that the collective identity of the customary village in Bali in opposing Benoa Bay reclamation occurred through a process of construction among social movement actors both in latent dimension (daily activities) and visible dimension through collective actions. The construction of the collective identity of the customary village members involved elements of cognition, affection or emotion, as well as social relations both in the internal movement groups, as well as with external parties.

Keywords: Benoa Bay reclamation project, collective identity, customary village, social movement,

Abstrak

Identitas kolektif warga desa adat Bali telah berperan penting dalam menciptakan konsistensi gerakan menolak proyek reklamasi Teluk Benoa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi identitas kolektif warga desa adat di Bali yang teraktivasi dalam bentuk gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi, studi ini mengkaji struktur kesadaran dari subjek dalam relasinya dengan fenomena gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Studi ini menemukan bahwa identitas kolektif warga desa adat di Bali dalam menentang reklamasi Teluk Benoa terjadi melalui proses konstruksi di kalangan pelaku gerakan baik dalam dimensi laten (aktivitas keseharian) mereka maupun dimensi *visible* melalui aksi-aksi kolektif. Konstruksi identitas kolektif warga adat tersebut melibatkan unsur kognisi, afeksi atau emosi, serta relasi sosial baik di internal kelompok gerakan, maupun dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: identitas kolektif, desa adat, gerakan sosial, reklamasi Teluk Benoa

1. Pendahuluan

Penentangan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa bermula dari SK Gubernur Bali Nomor: 2138/02-C/HK/2012 pada tanggal 26 Desember 2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Keputusan itu memberikan izin kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) untuk mengelola Teluk Benoa seluas 838 hektare selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. Setelah SK Gubernur tersebut dikeluarkan, sebuah koran *online* yang berpusat di Jakarta memberitakan tentang konsorsium perusahaan multinasional akan membangun proyek reklamasi di Teluk Benoa yang difungsikan untuk resor wisata, marina, dan sirkuit Formula 1 dengan total lahan seluas 100 hektare. Pemberitaan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis lingkungan. Wayan Gendo Suardana yang saat itu menjadi Direktur Eksekutif WALHI Bali menyatakan bahwa lahan 100 hektar di Teluk Benoa tidak mungkin diperoleh kecuali dengan reklamasi (Subarkah, 2016).

Aksi-aksi kolektif dalam menolak reklamasi Teluk Benoa mulai dilakukan sejak tanggal 13 Juli 2013 oleh komunitas masyarakat sipil dan musisi yang tergabung dalam wadah KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) (Erviani, 2013). Aksi kolektif desa-desa adat dalam arena gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR)

terjadi lebih dari dua setengah tahun semenjak mulai munculnya kontroversi reklamasi Teluk Benoa di pertengahan tahun 2013. Dalam rentang waktu tersebut, warga desa adat, *prajuru* (pengurus desa adat), dan *bendesa* (pemimpin desa adat) sudah mengetahui kontroversi itu dari media massa. Mereka membaca realitas reklamasi Teluk Benoa dan melihatnya berdasarkan konstruksi atas identitasnya. Identitas mereka sebagai warga desa adat dan sebagai orang Bali teraktivasi dan kemudian masuk dalam aktivisme gerakan sosial menolak reklamasi Teluk Benoa. Tindakan kolektif warga gabungan dari berbagai desa adat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa mulai terlihat pada tanggal 29 Januari 2016 ketika massa gabungan dan sejumlah desa adat di pesisir Teluk Benoa melakukan demonstrasi saat berlangsungnya konsultasi publik mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi Teluk Benoa.

Keterlibatan desa adat di Bali dalam gerakan BTR Teluk Benoa yang mulai berproses secara sporadis sejak tahun 2013 merupakan fenomena yang penting dalam perubahan desa adat di Bali dalam memandang identitas dirinya. Sebelumnya tidak pernah terjadi desa-desa adat di Bali berkoalisi untuk masuk dalam arena gerakan sosial. Sebagai lembaga sosial religius, desa adat secara tradisi lebih berorientasi internal untuk mengurus urusan adat di wilayahnya masing-masing. Kerja sama antar desa adat biasanya terkait dengan penyelenggaraan upacara agama di pura-pura besar yang dikelola oleh gabungan desa-desa adat di sekitar pura tersebut.

Pasca aksi demonstrasi antar desa adat pada tanggal 29 Januari 2016, desa-desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa kemudian membuat wadah organisasi yaitu *Pasubayan* yang terbentuk pada tanggal 16 Maret 2016. Sampai dengan bulan Agustus 2016, *Pasubayan* sudah terdiri atas 39 desa adat. *Pasubayan* yang anggotanya mencakup desa-desa adat yang tidak memiliki batas wilayah dengan Teluk Benoa menunjukkan terjadinya konstruksi identitas pan-Bali di kalangan warga desa adat yang menolak reklamasi. Mereka tidak hanya menampilkan identitas sebagai warga dari desa adat tertentu, namun menunjukkan identitas etno-

religi ke-Bali-annya. Reklamasi Teluk Benoa tidak semata-mata dilihat sebagai pencemaran kesucian terhadap wilayah desa adat yang memiliki wilayah atau memiliki batas wilayah dengan Teluk Benoa, namun juga dilihat sebagai pencemaran terhadap kesucian tanah Bali. Melalui kepercayaan tersebut, desa adat yang berada di luar wilayah Teluk Benoa pun merasa memiliki kepantasan untuk membela kesucian dari teluk tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang gerakan sosial melihat gerakan sebagai suatu entitas yang seolah-olah memiliki personalitas sehingga melewatkan pentingnya individu sebagai subjek yang menjalani pengalaman-pengalaman aktivismenya dalam gerakan sosial (McCarthy and Zald, 1977; McAdam, 1982; Cress and Snow, 2000; Soule and Olzak, 2004; Tilly and Tarrow, 2015). Karya dari Wardana (2017), Suryani (2015), serta karya dari Priadarsini, Dewi dan Prameswari (2018) yang menulis tentang gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa melihat persoalan gerakan ini dari sudut pandang makro. Mereka melihat fenomena gerakan sebagai suatu unit analisa. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini memfokuskan unit analisisnya pada level mikro yaitu individu-individu yang mengada di dalam dan berelasi dengan dunianya. Dunia yang dimaksud di sini bukanlah lokasi geografis melainkan ruang hidup atau *lifeworld* (Heidegger, 2011). Titik pijak dari artikel ini adalah individu yang memaknai pengalaman dalam relasinya dengan fenomena gerakan BTR. Dalam relasi tersebut, subjek juga berinteraksi dengan subjek-subjek lainnya. Artikel ini tidak melihat gerakan sosial sebagai sebagai kolektivitas seperti penelitian-penelitian sebelumnya, namun sebagai relasi subjek dalam dunianya dan dengan subjek lainnya.

2. Kerangka Teori dan Metode

Penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial Baru dari Melucci. Gerakan sosial menurutnya adalah bentuk tindakan kolektif yang melibatkan solidaritas; membuat suatu konflik menjadi manifes; dan melibatkan pelampauan atas batas-

batas kompatibilitas dari sistem sosial (Melucci, 1996). Melucci menyatakan bahwa kemauan dan kemampuan orang untuk terlibat dalam gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk mendefinisikan suatu identitas (1989; 1996). Dalam gerakan sosial kontemporer, konstruksi sosial atas identitas kolektif merupakan unsur yang esensial (Buechler, 2016). Identitas-identitas itu muncul melalui pilihan sadar dibandingkan peristiwa-peristiwa yang askriptif. Hal ini karena pembentukan identitas-identitas itu tidak ditentukan secara struktural. Konstruksi identitas itu terjadi dalam jaringan yang terdiri dari kelompok-kelompok beragam yang tersebar, terfragmentasi dan tenggelam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang bertindak sebagai laboratorium-laboratorium budaya. Gerakan-gerakan yang larut dalam keseharian pelaku tersebut memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan personal dan ekspresifnya melalui asosiasi-asosiasi yang di dalamnya individu-individu yang memiliki pemikiran yang sama. Asosiasi-asosiasi itu memberikan kerangka yang intensif bagi mobilisasi politik dan aksi kolektif (Melucci, 1996). Definisi umum identitas kolektif harus dipahami sebagai sebuah proses, karena dibangun dan dinegosiasikan melalui hubungan yang terus menerus yang menghubungkan individu atau kelompok (Melucci, 1996). Identitas kolektif adalah definisi interaktif dan dibagi bersama (*shared*) yang dihasilkan oleh sejumlah individu (atau kelompok pada tingkat yang lebih kompleks) mengenai orientasi tindakan mereka dan bidang peluang dan hambatan yang di dalamnya tindakan dilakukan (Melucci, 1992; Melucci, 1996). Individu-individu atau kelompok-kelompok saling mengakui satu sama lainnya dan menjadi bagian dari “kita” (Snow, 2001; Fominaya, 2010).

Elemen-elemen identitas kolektif terdiri dari pendefinisian secara kognitif, interaksi yang aktif, dan investasi afeksi atau emosi (Melucci, 1995; Melucci, 1996). Identitas kolektif mengandung pendefinisian secara kognitif dalam arti aktor membuat kalkulasi antara sarana dan tujuan. Identitas kolektif juga mengacu pada

proses yang di dalamnya terdapat hubungan aktif antara aktor yang berinteraksi, berkomunikasi, saling mempengaruhi, bernegosiasi, dan membuat keputusan. Elemen lainnya dari identitas kolektif adalah tingkat investasi (curahan) emosional yang memungkinkan individu merasakan dirinya bagian dari kesatuan yang sama. Semangat (*passion*), perasaan, cinta, benci, iman/kepercayaan dan ketakutan adalah bagian dari suatu kesatuan yang bertindak secara kolektif, terutama dalam kolektivitas yang kurang melembaga, seperti gerakan sosial. Elemen afektif memainkan peran penting dalam penciptaan koneksi dan ikatan baik dengan yang lain maupun dalam diri subjek, yang pada gilirannya memberikan dasar bagi konstruksi identitas dan mobilisasi gerakan (Melucci, 1996; Langman, 2013).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dari Gadamer (van Manen, 1990). Menurut Smith, fenomenologi didefinisikan sebagai studi tentang esensi dari pengalaman sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama yaitu orang yang mengalaminya (Smith, 2013). Penelitian fenomenologi menanyakan “Seperti apa pengalaman ini?” untuk mencoba membeberkan makna-makna yang ada dalam eksistensi manusia (Lavery, 2003). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam pada bulan Februari 2018 dengan delapan orang subjek yang memiliki peran penting dalam gerakan BTR. Subjek-subjek ini berasal dari tiga desa adat yaitu Tanjung Benoa, Kuta, dan Pasedahan. Tanjung Benoa adalah wilayah yang penduduknya paling terdampak dengan reklamasi Teluk Benoa. Kuta merupakan wilayah yang di dalamnya terjadi desakan yang cukup lama dari kalangan internal untuk mendesak Desa Adat Kuta menyatakan sikap menolak reklamasi. Pelaku gerakan dari Desa Adat Pasedahan dipilih sebagai subjek penelitian karena desa adat ini tidak memiliki perbatasan dengan Teluk Benoa dan berlokasi relatif jauh dari Teluk Benoa. Data penunjang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa berita-berita di media massa untuk memahami konteks terjadinya gerakan dan untuk memperjelas narasi dari subjek.

3. ForBALI dan Kajian Narasi Kesucian Teluk Benoa

Gerakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa sudah diawali oleh kalangan masyarakat sipil dan musisi mulai bulan Juli 2013. Gerakan ini kemudian bertransformasi menjadi ForBALI yang merupakan akronim dari Forum Rakyat BTR. Gerakan penolakan reklamasi di kalangan warga pesisir Teluk Benoa diawali oleh aksi kolektif di perairan Teluk Benoa oleh kelompok warga Desa Tanjung Benoa yang menamakan diri mereka dengan GEMPAR (Gerakan Masyarakat dan Pemuda Tolak Reklamasi) pada tanggal 3 Agustus 2013. Aksi-aksi kolektif di bulan Juli-Agustus 2013 terus dilakukan secara berkesinambungan dengan jumlah partisipan yang semakin banyak dan segmen kalangan yang semakin luas serta dengan sebaran wilayah yang juga semakin luas.

Subjek dengan inisial GJ menuturkan bahwa di tahun 2015, jumlah partisipan dalam aksi-aksi publik yang dimobilisasi oleh ForBALI sudah berjumlah ribuan orang, namun saat itu identitas desa adat Bali belum tampak dalam aksi-aksi kolektifnya. Mereka hadir dengan identitas sebagai penggiat isu lingkungan. Aksi-aksi berkesinambungan dari ForBALI berhasil membuat reklamasi Teluk Benoa menjadi isu yang diperbincangkan publik dan juga sekaligus menjadi bahan refleksi diri bagi sebagian orang yang kemudian bersimpati serta bergabung dalam gerakan BTR. GJ adalah salah seorang pemuda yang mengamati aksi-aksi dari ForBALI dan kemudian memutuskan untuk berpartisipasi dalam gerakan karena bersimpati dengan aktivis pemimpin ForBALI yang ia lihat berjuang sendiri melawan kekuatan yang besar terutama semenjak turunnya Pepres No. 51/2014 yang memberi payung hukum bagi rencana reklamasi Teluk Benoa. GJ kemudian menjadi koordinator dari suatu organisasi di desanya di Kuta yang dibentuk untuk menyuarakan penolakan reklamasi dan mendesak desa adatnya untuk mengambil sikap menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal yang serupa juga terjadi di dua desa adat lainnya yang diteliti yaitu di Tanjung Benoa dan Pasedahan. Sikap desa adat untuk menolak reklamasi diawali oleh gerakan penolakan reklamasi dari kelompok pemuda adat yang berkoordinasi dan berafiliasi dengan ForBALI.

Melalui organisasi-organisasi pemuda ini, ForBALI memiliki peran dalam menggugah kesadaran publik tentang dampak buruk reklamasi Teluk Benoa (Foto 1).



Foto 1. Demonstrasi menentang rencana reklamasi Teluk Benoa (Foto: Anton Muhajir)

Seperti yang dinyatakan oleh subjek dengan inisial NY di Kuta bahwa gerakan BTR yang telah dirintis oleh ForBALI telah menghadirkan isu Teluk Benoa di mata publik yang selama ini tidak disadari. Satu dimensi dari gerakan kontemporer adalah bahwa gerakan menjadi wahana yang membawa atau menunjukkan kepada publik suatu fakta bahwa ada dilema masyarakat dan konflik tentang orientasi dasar masyarakat (Melucci, 1996). Dengan wacana yang disuarakan melalui aksi-aksi kolektif yang dikordinir oleh ForBALI dan adanya pertemuan dengan pemuda-pemuda Kuta dan orang-orang ForBALI, NY mendapatkan pemahaman baru tentang alasan-alasan penolakan reklamasi Teluk Benoa yang meliputi ancaman banjir (air meluap), ketersediaan air bersih, dan penambahan jumlah penduduk yang terlalu besar yang akan berakibat pada penyediaan pemukiman baru, kemacetan lalu lintas, dan ancaman kriminalitas. Ia juga mendapat penjelasan dari aktivis ForBALI tentang peran dari investor dan Gubernur Bali dalam

mempengaruhi keluarnya Perpres No. 51/2014. Pemahamannya tersebut menggugah konstruksi identitas kolektifnya sebagai orang Bali. Ia merasa persoalan reklamasi Teluk Benoa adalah persoalan antara orang Bali dengan investor yang dianggapnya sebagai tamu yang melampaui batas kesopanan sebagai pendatang karena telah merencanakan proyek reklamasi tanpa berbicara terlebih dulu dengan desa-desa adat di pesisir Teluk Benoa. Dengan konstruksi identitas kolektif sebagai orang Bali, ia memandang bahwa *Bendesa* Kuta perlu diyakinkan agar Desa Adat Kuta menolak reklamasi. Ia melihat kekhawatiran terhadap reklamasi Teluk Benoa memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Pada tahun 2015, ForBALI melalui organisasi-organisasi cabangnya yang disebut dengan organisasi basis, telah mampu mendapatkan dukungan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Namun, saat itu belum ada desa adat yang secara terbuka menyuarakan penolakan dan melakukan gerakan untuk menolak reklamasi. Dalam rentang waktu tersebut, kontroversi reklamasi Teluk Benoa sudah diketahui oleh subjek berinisial WS yang merupakan *Bendesa* Kuta saat itu. Ia juga mengetahui kiprah dari organisasi Forum Kuta Perjuangan (FKP) yang secara kontinyu mendesak Desa Adat Kuta mengambil sikap menolak reklamasi. Secara pribadi ia sudah memiliki sikap untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, namun sebagai seorang *bendesa*, ia memerlukan alasan yang tepat yang sesuai dengan ranah dan posisi desa adat yaitu di ranah budaya Bali dan agama Hindu.

Hasil kajian dari Sugi Lanus, seorang ahli sastra Jawa Kuno dan peneliti lontar, yang disebarkan melalui jaringan ForBALI dan berbagai media massa lokal pada tanggal 6 November 2015 memberikan pemantik bagi legitimasi desa adat untuk terlibat dalam arena gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Lanus memaparkan tentang Teluk Benoa sebagai kawasan suci dengan posisinya sebagai *campuhan* (pertemuan beberapa muara sungai). Ia juga menjelaskan tentang keberadaan 70 titik suci di Teluk Benoa dan sekitarnya yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.

Seperti yang dinyatakan oleh WS, ketika membaca hasil kajian dari Sugi Lanus, ia merasa itu adalah penjelasan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Saat itu dia yakin bahwa kajian dari Sugi Lanus dapat menjadi dasar bagi Desa Adat Kuta dan desa adat pada umumnya untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Subjek WS sebagai *bendesa* mengundang Sugi Lanus untuk mempresentasikan hasil kajiannya dalam *paruman* (rapat adat) khusus di Desa Adat Kuta yang membahas tentang sikap Desa Adat Kuta terhadap reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 23 Januari 2016. Dengan dasar alasan kesucian kawasan Teluk Benoa seperti yang dipaparkan Sugi Lanus, rapat tersebut kemudian menghasilkan keputusan Desa Adat Kuta untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

Keputusan Desa Adat Kuta untuk menolak reklamasi memberikan tambahan energi bagi gerakan BTR. Atas permintaan dari ForBALI, WS sebagai *Bendesa* Kuta menghubungi koleganya sesama *bendesa* di desa-desa adat tetangga untuk menjelaskan sikap penting desa adat dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Kemunculan identitas desa adat sebagai pembela kesucian Teluk Benoa menemukan momentumnya ketika berselang tujuh hari setelah Desa Adat Kuta menyatakan sikap menolak reklamasi, investor mengadakan acara konsultasi publik terkait dengan AMDAL reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 29 Januari 2016. Acara itu menjadi momentum dalam menunjukkan kemunculan identitas adat Bali dalam menolak reklamasi yang diwujudkan dengan demonstrasi dari sejumlah desa adat yang memiliki batas wilayah dengan Teluk Benoa.

Mulai masuknya desa-desa adat di pesisir Teluk Benoa dalam arena gerakan BTR memberikan sejumlah dampak yang signifikan bagi gerakan. Pertama adalah meningkatkan moral dari penggiat gerakan BTR yang ada di masing-masing desa adat sekaligus membuat perjuangan menolak reklamasi menjadi bagian dari kewajiban adat. Seperti yang dinyatakan oleh GJ, sikap desa adatnya tersebut memberikan tambahan semangat bagi penggiat gerakan BTR di Kuta. Ia dan rekan-rekannya merasa lebih kuat karena sejak desa adat mereka mengambil sikap menolak reklamasi, mereka

merasa mendapat perlindungan dari para tetua mereka yaitu *prajuru* adat Kuta. Mereka tidak lagi melihat perjuangan menolak reklamasi sebagai perjuangan individu-individu orang Kuta, namun sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan Desa Adat Kuta yang telah menolak reklamasi. Identitas sebagai warga Desa Adat Kuta yang menolak reklamasi tumbuh beriringan dengan sikap resmi Desa Adat Kuta dalam menolak reklamasi.

Kedua, ada perubahan narasi dari penolakan reklamasi Benoa yang pada awalnya didominasi alasan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, kemudian berubah menjadi narasi pembelaan pada kesucian Teluk Benoa. Hal itu disebabkan karena narasi kesucian Teluk Benoa adalah alasan yang patut bagi masuknya desa adat dalam arena gerakan BTR. Menurut WS dan NY, alasan membela kesucian Teluk Benoa sudah sesuai ranah desa adat. Sejak awal pembentukannya ratusan tahun yang lalu, desa adat dibentuk memang diantaranya adalah untuk merawat *parhyangan* (tempat suci) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata hidup bersama. Dalam gerakan warga adat BTR, *framing* membela kesucian Teluk Benoa berasal dari pemaknaan warga adat terhadap kewajibannya sebagai orang Bali untuk menjaga kesucian tanah Bali. Budaya adat Bali hadir dalam gerakan dan menentukan *framing* dari gerakan. *Framing* sebagai pembela kesucian Teluk Benoa adalah bagian dari upaya untuk menegaskan identitas kolektif dari warga adat pelaku gerakan BTR. Dengan reformulasi nilai-nilai dan norma-norma, bingkai diskursif menguatkan identitas kolektif dan mencegah konflik-konflik internal yang dapat merusak persatuan (Melucci, 1993). Aksi dari gabungan desa adat tersebut diberitakan secara meluas oleh kelompok media Bali Post di Bali dan juga disebarluaskan melalui media sosial para penggiat dan pendukung gerakan BTR. Kampanye gerakan melalui media massa dan media sosial telah berkontribusi pada formasi identitas kolektif dan membantu mengkonstruksi narasi dalam gerakan (Khazraee and Novak, 2018). Aksi kolektif tersebut menarik perhatian dari *prajuru-prajuru* dari desa-desa adat lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh subjek WST dan KT dari Desa Adat

Pasedahan. Sejak sejumlah desa adat turun dalam gerakan BTR di bulan Januari 2016, mereka mulai mengamati perkembangan gerakan BTR melalui media massa dan juga melalui media sosial warga adatnya yang merantau di Denpasar yang sudah terlebih dulu ikut dalam gerakan BTR (Lihat Foto 2).



Foto 2. Berita utama mengenai bersatunya desa adat menolak reklamasi (Foto: Darma Putra).

Setelah aksi kolektif gabungan desa adat di bulan Januari 2016 tersebut, ForBALI menyebarkan kesucian Teluk Benoa sebagai alasan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan sarasehan tentang reklamasi Teluk Benoa pada sekitar bulan Februari 2016 di Candidasa (Karangasem) yang dihadiri oleh para *bendesa* adat di Kabupaten Karangasem. Sarasehan yang diorganisir oleh ForBALI bersama dengan Ashram Gandhi melibatkan narasumber dari tokoh dan aktivis yang menolak reklamasi Teluk Benoa diantaranya adalah Pedanda Made Gunung, *Bendesa* Kuta, dan Gendo (Koordinator ForBALI). Sarasehan itu juga diisi dengan

presentasi dari Sugi Lanus yang memamparkan kajiannya tentang Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Paparan dari para narasumber tersebut terutama presentasi dari Sugi Lanus membuat subjek berinsial WST saat itu secara pribadi langsung memutuskan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebagai orang Hindu Bali, subjek WST merasa *wirang* atau *jengah* (malu karena harga diri yang terusik) ketika saat sarasehan di Candidasa ia mendengar dari narasumber Sugi Lanus bahwa investor akan mengurug titik-titik suci yang ada di perairan Teluk Benoa dan memindahkan titik-titik suci tersebut untuk dijadikan satu kompleks di daratan. Baginya titik-titik suci di Teluk Benoa adalah karunia alam yang lokasinya tidak bisa dipindahkan oleh manusia. Tindakan memindahkan titik-titik suci di Teluk Benoa untuk dikumpulkan dalam satu tempat di daratan baginya adalah suatu pelecehan bagi jati dirinya sebagai seorang Hindu Bali.

4. Pra-Pemahaman Subjek dalam Memahami Teluk Benoa

Hasil kajian dari Sugi Lanus menjadi pertimbangan yang penting bagi kalangan warga adat dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Menurut penuturan subjek, warga adat yang tersensitisasi dengan alasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci adalah warga adat yang sudah menikah dan terutama adalah mereka yang menjadi *prajuru* adat. Seperti yang dinyatakan oleh Gadamer (2004) bahwa manusia adalah *historical being* (mahkluk yang menyejarah). Ia dibentuk oleh akumulasi pengalaman-pengalamannya yang mempengaruhi cara pandangnya dalam melihat realitas. Gadamer mengikut pendapat Heidegger bahwa pra-pemahaman merupakan makna-makna atau tatanan (organisasi) budaya yang sudah hadir sebelum kita memahami sesuatu (Laverty, 2003; Paley, 2013; Riyanto, 2018).

Sebelum subjek membaca atau mendengarkan kajian Sugi Lanus tentang Teluk Benoa sebagai kawasan suci, mereka sudah memiliki pra-pemahaman sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Subjek WS dibesarkan dalam lingkungan agama Hindu dan adat Bali. Ia adalah keturunan dari *pemangku* Pura Dalem Kuta. Ia sudah mengetahui dan meyakini bahwa Teluk Benoa adalah

kawasan suci namun belum mengetahui penjelasannya secara rinci. Dengan pra-pemahamannya tersebut, ia dengan cepat memahami hasil kajian dari Sugi Lanus dan menerimanya sebagai kebenaran serta menjadikannya sebagai legitimasi bagi ranah desa adat untuk turun dalam arena gerakan BTR. Pra-pemahaman lainnya yang relevan adalah subjek WS sudah sempat bertemu beberapa bulan sebelumnya ketika membahas peredaran minuman beralkohol di kawasan wisata. Dalam pertemuan tersebut subjek WS merasa sudah memiliki sikap saling percaya dengan Sugi Lanus dan sudah mengetahui kapasitas Sugi Lanus sebagai ahli sastra Jawa Kuno.

Subjek lainnya yaitu WST dan KK yang berasal dari Desa Adat Pasedahan memiliki pra-pemahaman yang membuat mereka dapat menerima dan mempercayai kajian Sugi Lanus bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci. Sebelum mendengarkan tentang kajian Sugi Lanus mereka sudah meyakini bahwa di Bali terdapat titik-titik suci yang merupakan karunia dari alam sehingga keberadaannya tidak bisa pindah atau sengaja diurug. Subjek KK pernah mengamati orang yang hidupnya menderita setelah menjual tanah yang di dalamnya terdapat titik suci. Sementara itu, keyakinan dari subjek SWT merujuk pada dari sejarah desanya. Dalam lontar yang berhubungan dengan sejarah desanya, ia mengetahui bahwa dulu pada abad ke-17, Raja Kerajaan Gelgel mengirim utusan sejumlah keluarga dari klan Tangkas untuk merawat (termasuk menghaturkan sesajen) di “rumah Dewa” di Pura Rambut Petung. Peristiwa itu membuatnya meyakini bahwa memang benar terdapat titik suci di Pura Rambut Petung. Alasan titik suci yang disebut “rumah Dewa” dalam lontar itulah yang membuat Raja Kerajaan Gelgel mengirim utusan untuk merawat pura tersebut dan menata kembali Desa Pasedahan setelah terjadinya perang antara Raja Gelgel dengan orang-orang Bali Mula. Jika titik suci di Pura Rambut Petung itu bisa dipindah, tentulah raja akan memindahkan Pura Rambut Petung di dekat istana kerajaan. Tindakan raja untuk merawat titik suci di Pura Rambut Petung berarti bahwa keberadaan titik suci di pura itu memiliki makna yang penting bagi kerajaan. Hal yang sama ia yakini bahwa titik suci di Teluk Benoa tidak bisa dipindah

seperti halnya Raja Gelgel yang tidak memindahkan titik suci yang ada di Pura Rambut Petung.

Bagi subjek-subjek yang berasal dari Desa Adat Tanjung Benoa, kajian dari Sugi Lanus menguatkan keyakinan mereka tentang kesucian Teluk Benoa. Sebelum kajian itu disebarluaskan ke publik mulai November 2015, warga Desa Tanjung Benoa secara turun temurun sudah meyakini kesucian Teluk Benoa. Subjek berinisial KD dan WBS sudah terbiasa melihat dan mendengar keseharian orang-orang di desanya merawat tempat-tempat suci yang ada di Teluk Benoa yang diantaranya adalah berupa *muntig-muntig* (dataran pasang surut). Bagi subjek KD, sejak pertama kali mendengar tentang reklamasi Teluk Benoa, yang ia pikirkan adalah *muntig-muntig* yang disucikan oleh warga desanya. Ia merasa tindakan dari investor untuk mengurug *muntig-muntig* tersebut sebagai tindakan yang merusak keyakinan orang-orang Desa Adat Tanjung Benoa. Sebagai warga adat Tanjung Benoa ia merasa berkewajiban menjaga titik-titik suci di Teluk Benoa yang sudah diyakini oleh masyarakat desanya secara turun temurun.

5. Pengkonstruksian Identitas Kolektif Adat Bali dalam Gerakan BTR

Menurut Melucci, identitas kolektif melibatkan tiga elemen yaitu proses kognitif, afektif, dan jaringan interaksi. Subjek memilih untuk mendefinisikan diri mereka dengan cara tertentu dan bukan hasil dari kalkulasi untung rugi bagi diri masing-masing individu pelaku gerakan (Melucci, 1996). Semua subjek menyebutkan diri mereka berjuang dalam wadah desa adat karena mereka merasa memiliki identitas sebagai warga desa adat. Tanpa adanya identitas tersebut, subjek tidak akan berupaya keras untuk mendesak atau mempengaruhi desa adatnya masing-masing agar menolak reklamasi Benoa.

Memilih identitas sebagai warga desa adat dalam gerakan BTR menunjukkan adanya unsur kognitif instrumental dari yaitu identitas itu sebagai bagian dari wahana untuk membatalkan reklamasi Teluk Benoa. Seperti yang dinyatakan oleh subjek WS bahwa ranah kesucian Teluk Benoa merupakan ranah dari Desa

Adat di Bali. Ia tidak ingin membawa desa adatnya masuk dalam perdebatan lain di luar ranah adat karena investor dengan mudah akan membantahnya. Jika desa adat menyatakan menolak karena alasan lingkungan, investor akan dengan mudah bisa menghadirkan ahli-ahli lingkungan yang menyatakan sebaliknya.

KD dan WBS di Desa Tanjung Benoa melihat identitas Desa Adat Tanjung Benoa dalam gerakan BTR merupakan hal yang krusial karena Tanjung Benoa merupakan barometer dari lolos tidaknya reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat Tanjung Benoa adalah orang-orang yang hidupnya paling dekat dengan Teluk Benoa sehingga paling terpengaruh dengan rencana reklamasi tersebut. Subjek di Tanjung Benoa meyakini bahwa jika desa-desa adat lain di Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, sementara Desa Tanjung Benoa setuju, maka investor dan pemerintah akan punya alasan untuk melanjutkan rencana reklamasi oleh karena masyarakat yang paling terpengaruh sudah setuju.

Para subjek yang bukan warga adat Tanjung Benoa merasa urusan reklamasi Teluk Benoa bukan semata-mata urusan dari warga Desa Adat Tanjung Benoa namun menjadi urusan dari warga adat di seluruh Bali. Mereka melihat titik-titik suci yang ada di Teluk Benoa sebagai bagian yang saling terhubung dengan titik-titik suci lainnya yang ada di Bali termasuk di desa-desa mereka masing-masing. Mereka melihat titik-titik suci yang ada di Teluk Benoa dan di wilayah lainnya di Bali sebagai satu kesatuan. Mereka meyakini dan memperlakukan titik-titik suci yang ada di Teluk Benoa sebagaimana halnya mereka merawat titik-titik suci yang ada di desanya. Dengan pandangan itu, mereka melihat ada kewajiban yang sama sebagai sesama warga adat Bali untuk membela Teluk Benoa sebagai kewajiban untuk menjaga kesakralan Bali secara keseluruhan. Bagi subjek, rusaknya kesucian tersebut mengandung arti adanya ketidakseimbangan kosmis yang dapat secara *sekala* (nyata) mempengaruhi kemakmuran orang Bali secara keseluruhan.

Identitas kolektif juga memiliki elemen afeksi yang salah satu di antaranya adalah solidaritas. Solidaritas memberi para pelaku gerakan suatu kemampuan untuk memahami keberadaan

mereka secara bersama. Melucci mengartikan solidaritas sebagai yaitu kemampuan dari aktor untuk mengakui dan diakui oleh orang lainnya, karena memiliki unit sosial yang sama (Melucci, 1996; Khazraee and Novak, 2018). Solidaritas memberi tenaga bagi identitas kolektif (Melucci, 1996). Semua subjek dalam penelitian ini menyatakan merasa memiliki ikatan antar pelaku gerakan meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Solidaritas dari warga desa adat dalam menolak reklamasi diwujudkan dalam wadah *Pasubayan* yang beranggotakan desa-desa adat yang sudah secara resmi (melalui rapat adat) menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa.

Emosi memberi tenaga bagi pembentukan identitas kolektif yang semakin mempertegas identitas antara “kita” dengan “mereka” (Melucci, 1996). Emosi yang umum di kalangan subjek adalah kesal dan marah terutama ditujukan kepada Gubernur Mangku Pastika yang tanpa sepengetahuan publik telah berkirin surat kepada Pemerintah Pusat untuk mengubah status hukum dari Teluk Benoa dari awalnya berupa kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan sehingga membuka peluang adanya rencana reklamasi untuk tujuan komersial. Sasaran kekesalan para subjek juga ditujukan pada investor PT TWBI yang dianggap telah menggunakan cara-cara yang manipulatif untuk memaksakan tujuannya. Di antaranya adalah dengan membuat perjanjian rahasia pada bulan Maret 2013 dengan beberapa individu *prajuru* Desa Adat Tanjung Benoa saat itu, yang pada intinya investor memberikan bantuan sarana dan prasarana dengan syarat Desa Adat Tanjung Benoa turut mengamankan lancarnya proyek reklamasi di Teluk Benoa. Subjek juga merasa kesal dengan tindakan dari investor yang memaksakan kehendaknya dalam mereklamasi Teluk Benoa tanpa terlebih dulu berdiskusi dengan desa-desa adat yang ada di pesisir Teluk Benoa. Dalam gerakan BTR, tindakan dari pihak lawan telah memicu emosi pada subjek yang sekaligus menunjukkan tanda adanya rasa kepemilikan (kekitaan) dari subjek pada kolektivitas gerakan (identitas kolektif) dan juga sekaligus melestarikan dan memperkuat identitas kolektif.

Demikian pula dengan emosi salut dan terharu dari para subjek saat melihat massa warga adat yang tertib dalam mematuhi instruksi dari mobil komando. Subjek berinisial GJ merasa salut atau terharu menyaksikan rekan-rekannya sesama penggiat gerakan BTR yang mengambil resiko untuk menerobos barikade polisi saat massa demonstran dihadang di jalan By Pass Ngurah Rai pada tanggal 20 Maret 2016. Ia menyaksikan langsung massa adat yang tanpa komando memberanikan diri untuk masuk ke jalan tol meskipun terdapat penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Rasa simpati dan bangga dari subjek pada rekan-rekannya warga adat pelaku gerakan menguatkan argumen dari Melucci (1996) bahwa identitas kolektif itu dinamis yang bisa berkontraksi atau berkembang dalam berbagai momen. Identitas kolektif pelaku gerakan BTR berkembang dengan atribusi karakteristik warga adat pelaku gerakan BTR yang nirkekerasan. Kebanggaan pada atribusi karakter nirkekerasan ini tidak akan muncul jika subjek tidak melihat peristiwa yang memang menunjukkan hal tersebut.

Ungkapan afeksi yang turut berkontribusi pada identitas kolektif saat afeksi itu teratribusi dengan predikat kemuliaan dari identitas kolektif. Hal itu tampak dari ungkapan subjek yang menyebutkan *wirang mabela pati* (menegakkan harga diri dengan membela sampai mati) pada *tanah palekadan* (tanah kelahiran). Ungkapan tersebut adalah bentuk semangat yang memuliakan jati diri adat Bali. Bahkan, semangat *wirang mabela pati* oleh subjek WS dan NY dinyatakan sebagai wujud bhakti kepada Tuhan. Demikian pula dengan subjek KD yang merasa memiliki keberanian untuk menentang reklamasi karena didasari oleh rasa bhakti pada *sesuhuhan* Bhatara Dalem Ped dan juga keberanian untuk membela tanah kelahirannya di Tanjung Benoa. Ungkapan emosi yang heroik seperti itu membuat subjek merasa yakin dan bersemangat dengan identitas kolektif. Menurut Melucci, identitas kolektif bukanlah benda atau reifikasi namun tergantung dari serangkaian interaksi yang terbentuk secara bersama. Jaringan interaksi ini oleh Melucci (1996) disebut sebagai elemen identitas kolektif yang ketiga. Identitas kolektif tidak pernah merupakan *datum* yang definitif, namun

merupakan proses intensif dan dinamis (Melucci, 1996; Afuape, 2016). Konstruksi identitas kolektif sebagai warga desa adat Bali penentang reklamasi terbentuk secara bertahap dan melalui jaringan interaksi dengan lingkungannya masing-masing. Ada subjek yang memulai konstruksi identitas kolektifnya dari komunitas adat dan ada pula yang mulai dari lingkungan pekerjaan dan kelompok pemuda.

Melucci (1996) melihat konstruksi identitas kolektif dalam gerakan sosial terjadi dalam dua dimensi yaitu *visible* dan *laten*. Dimensi *visible* dari gerakan sosial warga desa yang menolak reklamasi adalah mobilisasi yang mengarah pada tindakan kolektif (penggerakan massa) dengan berbagai tindakan kolektif. Dalam dimensi *laten*, gerakan sosial terdiri dari jaringan-jaringan tidak terlihat dari kelompok-kelompok kecil yang tenggelam dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan-jaringan yang tenggelam ini memberikan kebutuhan pada individu-individu berupa identitas kolektif. Potensi resistensi atau oposisi ditenun dalam wadah keseharian (Melucci, 1996). Dalam proses gerakan sosial warga adat BTR, terdapat hubungan yang timbal balik antara tindakan subjek dalam dimensi *laten* dan dimensi *visible*. Sebelum subjek ikut dalam tindakan kolektif, mereka berkomunikasi dengan orang-orang lain yang merupakan jaringan kesehariannya untuk mengkonstruksi makna tentang reklamasi Teluk Benoa dan posisi mereka terkait dengan rencana tersebut. Jaringan keseharian dari subjek mencakup lingkungan pekerjaan (sesama nelayan), kelompok pemuda, dan komunitas adat.

Pembentukan dan penegasan sikap menolak reklamasi serta solidaritas sebagai penentang reklamasi terjadi dalam jaringan-jaringan sosial dalam dimensi *laten* ini. Aksi-aksi kolektif yang diikuti oleh subjek baik berupa tindakan kolektif langsung seperti demonstrasi dan tindakan kolektif yang simbolik seperti aksi teatrikal atau ritual keagamaan, menyegarkan kembali (*rejuvinate*) dan memperkuat solidaritas dengan cara membawa solidaritas pada dimensi *laten* ke dimensi *visible* dengan ruang publik yang lebih luas. Dalam aksi-aksi publik yang diikuti oleh subjek, mereka mengalami interaksi berupa pertukaran afeksi dan pertukaran solidaritas secara langsung dengan warga dari desa adat lain yang

ada di lokasi tempat berlangsungnya aksi kolektif.

6. Simpulan

Konstruksi identitas kolektif sebagai warga desa adat Bali penentang reklamasi Teluk Benoa terbentuk melalui proses yang melibatkan unsur kognisi, afeksi, dan interaksi sosial. Secara kognitif, identitas kolektif dari pelaku gerakan BTR adalah persoalan pilihan sadar dari subjek yang mendefinisikan jati diri mereka sebagai suatu kelompok. Jati diri desa adat tampil dalam arena gerakan BTR karena desa adat memiliki legitimasi dalam ranah budaya Bali dan agama Hindu. Desa adat juga dipandang sebagai komunitas yang disegani oleh publik sehingga diyakini memiliki kekuatan untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. Unsur emosi atau afeksi dalam identitas kolektif warga desa pelaku gerakan BTR memberikan mereka kemampuan untuk memahami kolektivitas mereka secara bersama. Emosi juga memberikan vitalitas dalam pembentukan kolektif untuk mempertegas jati diri antara “kita” dan “mereka” (lawan). Baik unsur kognitif dan emosi/afeksi dalam konstruksi identitas kolektif warga adat penentang reklamasi terjadi melalui interaksi sosial baik dengan secara internal dengan sesama penggiat gerakan maupun juga dengan pihak eksternal terutama pihak lawan. Strategi pihak lawan yang g-manipulatif turut menguatkan identitas kolektif dari warga desa adat penentang reklamasi.

Konstruksi identitas kolektif warga desa adat penentang reklamasi lebih banyak terjadi dalam masa laten. Konstruksi identitas kolektif tersebut terjadi dalam jaringan keseharian yang di dalamnya mereka merasakan keterbukaan dalam berdiskusi dengan orang-orang di dalam lingkungan atau jaringannya. Aksi-aksi kolektif dalam gerakan berperan dalam memberi semangat pada identitas kolektif. Baik dalam dimensi laten maupun *visible*, konstruksi identitas kolektif dari warga desa adat penentang reklamasi memiliki energi konfliktual (perlawanan) ketika mereka merasakan adanya kepemilikan secara tradisi, budaya, dan agama atas obyek yang menjadi sengketa yaitu Teluk Benoa. Dengan identitas kolektif, mereka menuntut agar titik-titik suci di Teluk

Benoa dijaga berdasarkan agama Hindu Bali. Atas dasar tradisi, identitas kolektif mereka juga mengklaim agar ruang hidup dari nelayan yang secara tradisi mendapatkan penghidupan dari Teluk Benoa harus tetap lestari.

Daftar Pustaka

- Afuape, T. 2016. 'Beyond awareness of "difference" and towards social action: "Solidarity practice" alongside young people', *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 21(3), pp. 402–415.
- Buechler, S. M. 2016. *Understanding Social Movement: Theories from Classical Era to the Present*. New York: Routledge.
- Cress, D. M. and Snow, D. A. 2000. 'The outcomes of homeless mobilization: The influence of organization, disruption, political mediation, and framing', *American Journal of Sociology*, 105, pp. 1063–1104.
- Erviani, N. K. 2013. *Lagi, Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa*, *mongabay.co.id*. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2013/08/01/lagi-masyarakat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa-di-bali/> (Accessed: 12 July 2019).
- Fominaya, C. F. 2010. 'Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates', *Sociology Compass*, 4(6), pp. 393–404.
- Gadamer, H.-G. 2004. *Truth and Method*. 2nd edn. New York: Continuum.
- Heidegger, M. 2011. *Being and Time*. New York: Harper & Row.
- Khazraee, E. and Novak, A. N. 2018. 'Digitally mediated protest: Social media affordances for collective identity construction', *Social Media + Society*, pp. 1–14.
- Langman, L. 2013. 'Occupy: A new new social movement', *Current Sociology*, 61(4), pp. 510–524. doi: 10.1177/0011392113479749.
- Laverty, S. M. 2003. 'Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations', *International Journal of Qualitative Methods*, 2(3), pp. 1–29.
- van Manen, M. .1990. *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. New York: State University of New York Press.
- McAdam, D. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.

- McCarthy, J. D. and Zald, M. N. 1977. 'Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory', *Social Movements in an organizational society: Collected Essays*, 82(6), pp. 1212–1241. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Melucci, A. 1989. *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press.
- Melucci, A. 1992. 'Liberation or Meaning? Social Movements, Culture and Democracy', *Development and Change*, 23(3).
- Melucci, A. 1995. 'The Process of Collective Identity', in Johnston, H. and Klandermans, B. (eds) *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 41–36.
- Melucci, A. 1996. *Challenging Code*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paley, J. 2013. 'Heidegger, Lived Experience and Method', *Journal of Advanced Nursing*, 70(7), pp. 1520–1531. doi: 10.1111/jan.12324.
- Priadarsini, N. W. R., Dewi, P. R. K. and Prameswari, A. A. A. I. 2018. 'Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali', *Jurnal Kajian Bali*, 08(02), pp. 159-176.
- Riyanto, A. 2018. *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Smith, D. W. 2013. *Husserl*. 2nd edn. London and New York: Routledge.
- Snow, D. 2001. 'Collective Identity and Expressive Forms'. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/2zn1t7bj>: UC Irvine: Center for the Study of Democracy. Available at: <https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt2zn1t7bj/qt2zn1t7bj.pdf?t=lnrmnv>.
- Soule, S. A. and Olzak, S. 2004. 'When do movements matter? The politics of contingency and the equal rights amendment', *American Sociological Review*, 69, pp. 473–497.
- Subarkah, T. 2016. 'Menguruk Benoa', *Tirto.co.id*, 16 September. Available at: <https://tirto.id/menguruk-benoa-bKUN>, accessed July 2, 2017.
- Suryani, D. P. S. 2015. *Mencermati Relasi Lokal dan Global: 'Bali Tolak Reklamasi' sebagai Pergerakan Sosial Alternatif dalam Mekanisme Ekonomi Pasar*. Universitas Indonesia.
- Tilly, C. and Tarrow, S. 2015. *Contentious Politics*. 2nd edn. New York: Oxford University Press.
- Wardana, A. 2017. 'Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali', *Wacana*, 35(19).